

**AKSES REFORMA AGRARIA DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN
SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH SABUT
KELAPA: Studi di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ZALFA NADA HAMIDAH

NIT.22314515

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Agrarian Reform focuses not only on asset restructuring through land redistribution and asset legalization but also on strengthening community access to economic resources via the Agrarian Reform Access Program. One instance of this program's implementation took place in Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, involving the processing of coconut husk waste into economically valuable cocopeat products.

This study aims to analyze the implementation of the Agrarian Reform Access Program, identify the role of coconut husk waste utilization in fostering community social self-reliance, and examine the factors supporting and hindering the program's execution. A descriptive qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation.

The findings indicate that the Agrarian Reform Access Program was implemented through stages including social mapping, outreach, group formation, training, business mentoring, the provision of production equipment, and marketing facilitation. The program benefited the community by increasing the value of coconut husk waste and fostering collaboration among artisans. However, full community social self-reliance has not yet been achieved, as the community still requires guidance in decision-making and business development. Supporting factors included local resource potential, government support, and cooperation among group members, while hindering factors included limitations regarding raw material quality and marketing, as well as a continued reliance on external mentoring.

Keywords: *Access to Agrarian Reform, Cocopeat, Social Self-Reliance, Community Empowerment*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Batasan Masalah.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	37
C. Definisi Operasional Konsep	38
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	42
BAB IV	45
PROFIL KALURAHAN SENDANGSARI	45
BAB V.....	51

KEMANDIRIAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH SABUT KELAPA	51
A. Implementasi Program Akses Reforma Agraria	51
1. Fase Pertama	51
2. Fase Kedua	61
B. Kemandirian Sosial Masyarakat.....	76
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	82
BAB VI	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran Bagi Masyarakat Pengrajin Limbah Sabut Kelapa	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan (Ghofur & Fasa, 2025). Reforma Agraria telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam perkembangan kebijakannya Reforma Agraria tidak lagi dimaknai sebatas pembagian atau legalisasi kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup upaya penataan akses bagi masyarakat penerima manfaat agar mampu mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif dan berkelanjutan.

Penegasan mengenai pentingnya penataan akses tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Reforma Agraria dilaksanakan melalui dua pilar utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan akses dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada Subjek Reforma Agraria berupa akses permodalan, pendampingan usaha penguatan kelembagaan, serta akses terhadap pasar. Dengan demikian, Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum atas tanah, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat sebagai tujuan jangka panjang pembangunan desa.

Kemandirian masyarakat, khususnya kemandirian sosial menjadi aspek penting dalam keberhasilan Reforma Agraria. Kemandirian sosial dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk mengelola kelembagaan lokal, serta mengambil keputusan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar, seperti pemerintah atau pelaku ekonomi tertentu (Mardikanto, 2012). Keberhasilan Reforma Agraria dengan demikian tidak hanya diukur dari

peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terbentuknya hubungan sosial yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat komunitas desa (Suharto, 2014).

Namun demikian, upaya mewujudkan kemandirian sosial masyarakat desa tidak dapat dilepaskan dari kondisi kemiskinan yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat pedesaan. Kalurahan Sendangsari termasuk kalurahan yang memiliki angka kemiskinan tinggi di Kulon Progo (Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, 2025). Kemiskinan tidak hanya tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, permodalan, pengetahuan, serta peluang usaha yang berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat, tingginya ketergantungan terhadap pihak luar, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Akses Reforma Agraria, karena tanpa penguatan kapasitas dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal, kepastian hukum atas tanah belum tentu mampu mendorong terwujudnya kemandirian sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program Akses Reforma Agraria di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala, banyak program belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan karena akses pendukung yang diberikan belum berjalan secara optimal. Keterbatasan permodalan, lemahnya akses pasar, serta minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan menjadi persoalan yang sering ditemui di lapangan (Syahyuti, 2004). Kondisi ini menyebabkan masyarakat penerima manfaat kesulitan mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Sehingga tujuan Reforma Agraria untuk membangun kemandirian sosial masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Peran Kantor Pertanahan sebagai pelaksana teknis Reforma Agraria menjadi sangat penting dalam konteks ini. Berdasarkan Petunjuk Teknis penataan Akses Reforma Agraria yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan tidak hanya bertugas dalam aspek legalisasi dan penataan aset, tetapi juga berperan dalam

memfasilitasi penataan akses bagi masyarakat (Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria, 2025). Fasilitas tersebut meliputi proses menjembatani antara masyarakat dengan instansi terkait, pendampingan dalam pengembangan usaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Namun di lapangan masih ditemukan indikasi bahwa fasilitas tersebut cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh kebutuhan substantif masyarakat. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria tahun 2025, target Penataan Akses di Provinsi DIY mencapai 1000 Kepala Keluarga (Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria, 2025).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis desa sebagai strategi penguatan ekonomi lokal. Sentralisasi UMKM di desa diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan ekonomi desa terhadap wilayah lain. Akan tetapi, berbagai studi menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di desa seringkali belum berjalan efektif karena lemahnya kelembagaan, rendahnya integrasi antar pelaku usaha, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan (Ahbar, 2021). Tanpa kelembagaan yang kuat, masyarakat cenderung bergantung pada pihak luar seperti tengkulak atau perantara dalam pemasaran hasil usaha. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga melemahkan kemandirian sosial karena masyarakat kurang memiliki ruang untuk mengambil keputusan secara kolektif dan mandiri (Suryo, 2016).

Salah satu potensi sumber daya lokal yang relevan dalam konteks pembangunan desa adalah limbah sabut kelapa. Selama ini sabut kelapa sering dipandang sebagai limbah yang tidak bernilai ekonomi, bahkan menimbulkan permasalahan lingkungan. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sabut kelapa dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti kerajinan, *cocopeat*, dan bahan baku industri rumah tangga (Hartawaty et al., 2020). Pengelolaan limbah sabut kelapa secara kolektif juga berpotensi memperkuat kerja sama dan solidaritas sosial masyarakat.

Di Kalurahan Sendangsari, limbah sabut kelapa masih menjadi limbah yang belum siap dijual di pasaran. Program ini diharapkan menjadi sarana pengembangan potensi lokal sekaligus penguatan hubungan sosial antar warga dan menghasilkan nilai jual di pasar. Permasalahan tersebut diperkuat oleh pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelatihan sering kali tidak diikuti dengan pendampingan berkelanjutan, sehingga keterampilan yang diperoleh masyarakat tidak dapat diterapkan secara optimal. Tanpa pendampingan dan penguatan kelembagaan, pemanfaatan limbah sabut kelapa sulit berkembang menjadi kegiatan kolektif yang berkelanjutan dan mampu membangun kemandirian sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara tujuan ideal program Akses Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya di tingkat desa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria disebutkan bahwa salah satu tujuan kegiatan Akses Reforma Agraria adalah mendorong inovasi kewirausahaan. Namun, dalam penelitian Ahbar (2021), dan Oto Yulianto (2025), dalam realitanya masyarakat penerima program belum sepenuhnya paham mengenai substansi program dan belum ada pendampingan agar masyarakat meningkatkan produktivitas usahanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi program Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari, khususnya dalam mendorong pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai sarana membangun kemandirian sosial masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat dalam membangun kemandirian sosial masyarakat melalui pemanfaatan limbah sabut kelapa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa program Akses Reforma Agraria dirancang untuk tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga mendorong terwujudnya kemandirian sosial masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan, khususnya dalam

upaya mendorong masyarakat memanfaatkan limbah sabut kelapa sebagai sarana penguatan kemandirian sosial.

Keterbatasan pendampingan, lemahnya kelembagaan, serta masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realita di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi program Akses Reforma Agraria berjalan, sejauh mana pemanfaatan limbah sabut kelapa mampu mendorong kemandirian sosial masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Atas dasar tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Akses Reforma Agraria melalui kegiatan pemanfaatan limbah sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari?
2. Bagaimana kegiatan pemanfaatan limbah sabut kelapa mampu mendorong masyarakat pengrajin limbah dalam membangun kemandirian sosial?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membangun kemandirian sosial masyarakat melalui pemanfaatan limbah sabut kelapa pasca adanya program Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Akses Reforma Agraria melalui kegiatan pemanfaatan limbah sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan pemanfaatan limbah sabut kelapa untuk mendorong masyarakat pengrajin limbah dalam membangun kemandirian sosial.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun kemandirian sosial masyarakat melalui pemanfaatan

limbah sabut kelapa pasca adanya program Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya terkait dengan Reforma Agraria, pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian sosial masyarakat Desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi program Akses Reforma Agraria berbasis pemanfaatan potensi lokal.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Kantor Pertanahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program Akses Reforma Agraria, khususnya terkait efektivitas pendampingan, penguatan kelembagaan dan pengembangan potensi lokal masyarakat desa.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Kalurahan Sendangsari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kemandirian sosial masyarakat serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan limbah sabut kelapa secara kolektif dan berkelanjutan.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada implementasi Program Akses Reforma Agraria melalui kegiatan pemanfaatan limbah sabut kelapa di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan program tersebut mampu mendorong kemandirian sosial masyarakat pengrajin limbah sabut kelapa.

Kemandirian sosial dalam penelitian ini tidak dikaji secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, melainkan dibatasi pada kemandirian sosial dianalisis dalam konteks kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengembangkan diri melalui kegiatan

usaha, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan, mampu mengambil keputusan dan inisiatif dalam menjalankan usaha, serta memiliki kepercayaan diri untuk bekerja secara mandiri. Batasan tersebut mengacu pada indikator kemandirian sosial menurut Desmita (2009), yang dianalisis dalam konteks aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai bagian dari implementasi Program Akses Reforma Agraria.

Dengan adanya batasan tersebut, penelitian ini tidak membahas aspek kemandirian sosial di luar kegiatan ekonomi, seperti hubungan sosial dalam keluarga, pendidikan, maupun kehidupan bermasyarakat secara umum. Penelitian difokuskan pada perubahan perilaku dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha berbasis limbah sabut kelapa sebagai salah satu bentuk pemberdayaan melalui Program Akses Reforma Agraria.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi program Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sendangsari telah dijalankan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal, yaitu limbah sabut kelapa. Program ini tidak hanya berhenti pada penataan akses secara administratif, tetapi juga diwujudkan melalui pemetaan sosial, pembentukan dan penguatan kelompok pengrajin, pendampingan usaha, bantuan alat pengolah *cocopeat*, serta dukungan dalam pengembangan pemasaran. Melalui program tersebut, limbah sabut kelapa yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal mulai diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, sehingga membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat.
2. Kegiatan pemanfaatan limbah sabut kelapa telah mendorong tumbuhnya kemandirian sosial masyarakat pengrajin. Hal tersebut terlihat dari adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan usaha, rasa tanggung jawab terhadap kegiatan dan alat produksi, serta munculnya kepercayaan diri dalam menjalankan pekerjaan secara mandiri. Masyarakat tidak lagi hanya melihat sabut kelapa sebagai sisa produksi, tetapi mulai memandangnya sebagai sumber daya yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi usaha yang bernilai. Dalam prosesnya, kegiatan ini bukan hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk sikap sosial masyarakat agar lebih aktif, bertanggung jawab, dan berani mengambil keputusan dalam kelompok maupun dalam usaha sehari-hari, walaupun belum sepenuhnya berada pada titik kemandirian sosial yang utuh. Terlihat dari masih adanya hambatan yang memengaruhi keberlanjutan usaha, seperti masyarakat masih berpengaruh terhadap bantuan dari orang lain dalam pengambilan

keputusan, keterbatasan modal, ketersediaan bahan baku yang belum stabil, pengaruh cuaca terhadap proses produksi, keterbatasan sarana produksi tambahan, serta belum optimalnya akses terhadap pembiayaan dan pemasaran.

3. Faktor pendukungnya antara lain bantuan alat dari program, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah kalurahan dan pendamping, dukungan keluarga serta lingkungan sekitar, pengalaman usaha yang sudah berlangsung turun-temurun, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan modal, kendala kualitas bahan baku dan cuaca, keterbatasan akses pembiayaan formal, sarana produksi yang masih belum lengkap, serta persepsi masyarakat pengrajin limbah sabut kelapa bahwa setiap ada pendampingan pasti ada bantuan.

B. Saran Bagi Masyarakat Pengrajin Limbah Sabut Kelapa

1. Kelompok pengrajin sabut kelapa diharapkan terus memperkuat kerja sama internal kelompok, menjaga sarana produksi yang telah dimiliki, dan meningkatkan inisiatif dalam mengembangkan usaha. Kelompok juga perlu mulai membangun pengelolaan usaha yang lebih tertata, misalnya melalui pembagian tugas yang jelas, pencatatan hasil produksi, pengelolaan keuangan sederhana, dan perencanaan pemasaran. Langkah tersebut penting agar kemandirian sosial yang sudah mulai tumbuh dapat berkembang menjadi lebih kuat dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar.
2. Masyarakat pengrajin diharapkan tetap mempertahankan semangat untuk mengembangkan usaha pemanfaatan limbah sabut kelapa, karena kegiatan ini terbukti tidak hanya memberi manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat kemampuan sosial masyarakat dalam bekerja sama, bertanggung jawab, dan mengambil inisiatif. Masyarakat juga perlu terus terbuka terhadap inovasi, baik dalam pengolahan produk, pemasaran, maupun pengelolaan usaha, agar

kegiatan yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan peluang pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D. W. (2025). *Penataan Akses Reforma Agraria dalam Pengembangan Budi Daya Ikan Lele berbasis Potensi Lokal di Desa Kujangsari, Kecamatan Legensari, Kota Banjar*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahbar, F. K. (2021). *Akses Reform sebagai Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Akbar, H. (2025). *Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Berdaya Di Desa Menanga Kecamatan Rendang, Karangasem*. *Widyanata*, 22(2), 72–80.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Edisi 5). PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fahrezy, J. A., & Eriyanti, F. (2024). Faktor Pendukung dan Penghambat Stakeholders Dalam Pemberdayaan Petani Asam Kandis di Nagari Salibutan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1, 1–10.
- Fitrianesti, R. (2020). *Pemberdayaan untuk Membangun Kemandirian Masyarakat di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gazali, & Rahim, I. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 30–47.
- Ghofur, R. A., & Fasa, M. I. (2025). *Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan* : 9(1), 389–407.
- Harsono, H. (2006). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Grafindo Raya.
- Hartawaty, D., Susanti, H. I., Agribisnis, S., Halal, F. I., Ulama, U. N., Peternakan, F., Islam, U., Makasar, N., & Selatan, S. (2020). *Analisis Usaha Kerajinan Sabut Kelapa di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*. 27(April), 1–11.

- Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1, 1–9.
- Judijanto, L., Tahir, U., & Pahrijal, R. (2024). *Analisis Bibliometrik tentang Pemanfaatan Limbah Organik untuk Energi Terbarukan*. 03(08), 1183–1194.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. (2025). *Laporan Akhir Fasilitas Pendampingan Usaha*.
- Kurniati, D., & Jailani, M. S. (2023). *Kajian Literatur : Referensi Kunci , State Of Art , Keterbaruan Penelitian (Novelty)*. 1, 1–6.
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., Apsarini, S. F., & Tangerang, U. M. (2021). *Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III*. 3, 119–128.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Maolida, S. dkk. (2025). *Ekonomi Hijau Masyarakat Desa Kesik , Kecamatan Masbagik , Lombok Timur Utilization Of Livestock Waste As A Realization Of Green Economy Of The Village Community Of Kesik , Masbagik District , East Lombok Mutia Nur Kholisah ⁵ , Cahya Ningrum Ma ' idah Put*. 3(April), 235–243.
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalin, A., Apriani, W., Fiansi, Fitra, Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., Milasari, L. A., Siagian, A. F., & Martono, S. M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Widian Media Utama.
- Mulyani, R., Anwar, D. I., & Nurbaeti, N. (2021). *Pemanfaatan Sampah Organik untuk Pupuk Kompos dan Budidaya Maggot Sebagai Pakan Ternak*. 6(1).
- Nafisah, Z., Rahman, S., Pereiz, Z., & Kumalasari, M. R. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Pemanfaatan Limbah Cair Tempe Menjadi Biogas di Desa Habaring Hurung*. 5(1), 24–32.
- Nugraha, I., Firdausi, M. R., & Haikal, M. A. (2025). *Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria*. 2(1).
- Oto Yulianto, I. (2025). *Problematisasi Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 Di Kabupaten Temanggung*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria (2025).
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13086.
- Putri, K. J., & Mulyono, S. E. (2025). *Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM batik ciprat cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. 6(10), 795–808. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i3.23878>
- Rachma, N. (2024). *Pemberdayaan umkm dalam meningkatkan kemandirian masyarakat*. 8(3), 4–6.
- Rahmadi, A., Mirad Sari, N., & Indriyani, E. (2022). *Pemanfaatan Limbah Industri* (Issue 38). CV. Banyubening Cipta Sejahtera.
- Rifai, Y. (2023). *Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset*. 1(1), 31–37.
- Rosanti Melli, M., & L.D Bessie, J. (2018). *Analisis Faktor Penunjang Dan Penghambat Pengembangan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Alam Bola Palelo, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan)*. 7(2), 269–286.
- Sadewa, T. (2025). *Makna Akses Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta*.
- Setiawan, G. (2009). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., & Santoso, M. H. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal*. 4(1), 1494–1503.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sulistiyan, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Suryo, H. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat*. I(29).
- Syahyuti. (2004). *Kendala Pelaksanaan Land Reform di Indonesia : Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria*. 89–101.
- Syaukani. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Tresnawati, R., Octavia, E., Herawati, S. D., & Latif, D. V. (2021). *Pemberdayaan*

Masyarakat Menuju Ke Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mandirian. 01(03), 252–259.

Usman, N. (2005). *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. CV Sinar Baru.

Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (2021). CV. Alfabeta, Bandung.

Wira, S., Salman, A., Aziz, A., Wahanisa, R., & Adymas, M. (2024). *Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa*. 1, 1–10.

Yani, A. S., & Putra, R. J. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Cileuksa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui UMKM*. 3(1), 1–5.